

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM IMPORTIR DALAM PERJANJIAN EKSPOR IMPOR BERKAITAN DENGAN ADANYA PUTUSAN ARBITRASE SINGAPURA

(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1558 K/Pdt/2009)

Pelaksanaan transaksi jual-beli ekspor impor tidak selalu berjalan dengan lancar seperti yang diharapkan. Salah satu contoh kasus yang menjadi fokus kajian dari penelitian ini adalah tentang pelaksanaan perjanjian kontrak jual beli Para Xylene yang dilakukan antara PT Polyprima Karyareksa dari Indonesia selaku importir dengan Daelim Corporation perusahaan dari Korea Selatan.

Permasalahan yang menjadi fokus studi dari penelitian ini antara lain adalah: 1) bagaimana perlindungan hukum importir dalam perjanjian ekspor impor berkaitan dengan adanya putusan arbitrase singapura?. 2) Apakah pelaksanaan jual beli ekspor impor dalam pembayaran menggunakan *letter of credit* yang disengketakan tersebut merupakan bentuk wanprestasi atau perbuatan melawan hukum?

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan *Yuridis Normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang meletakkan hukum sebagai sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah, peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.

Hasil penelitian memberikan penjelasan bahwa pengadilan tidak dapat menyelesaikan perkara antara PT Polyprima Karyareksa dan Daelim Corporation dikarenakan *sales contract* yang telah disepakati kedua belah pihak mencantumkan bahwa Arbitrase Singapura merupakan tempat yang dipilih sebagai penyelesaian sengketa. Namun berdasarkan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa dinyatakan adanya kewenangan bagi Hakim untuk menolak putusan Arbitrase apabila dinyatakan melawan hukum. Perlindungan Hukum bagi PT Polyprima Karyareksa masih belum diupayakan secara optimal, karena pemeriksaan persidangan arbitrase Singapura menganggap bukti yang diajukan oleh PT Polyprima Karyareksa lemah karena berupa fotocopy. Penelitian ini menjelaskan bahwa perbuatan melawan hukum telah terjadi dan merugikan PT Polyprima Karyareksa sehingga dasar kerugian dan tuntutan akan penegakkan keadilan tersebut dapat digunakan sebagai pertimbangan oleh hakim dalam menetapkan putusan.

Pada akhirnya melalui tesis ini perlu ada sinkronisasi dan harmonisasi mengenai substansi antara Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dengan Undang-undang

## **ABSTRACT**

### **LAW PROTECTION FOR IMPORTER IN IMPORT EXPORT AGREEMENT RELATING TO THE EXISTENCE OF ARBITRATION DECISIONS OF SINGAPORE**

**(Study of Supreme Court Decision No. 1558 K / Pdt / 2009)**

Implementation of the transaction exports and imports do not always run as smoothly as hoped. One example is focus of this research study is a neighbor implementation of the agreement of sale and purchase contracts made between Para Xylene PT Polyprima Karyareksa of Indonesia as the importer with Daelim Corporation company of South Korea.

The focus of this research are: 1) How to protect importir on export – import agreement regarding arbitration dispute settlement in singapore? 2) Is the implementation of an import-export trading in the disputed letter of credit is a form of default or unlawful?

The method used in this research is normative juridical. Normative legal research is research that laying down the law as a system of norms. Norm system in question is about principles, norms, rules, regulations, court decisions, agreements and doctrines or teachings.

The results of the study shows that court in Indonesia unable to resolve the matter between PT Polyprima Karyareksa and Daelim Corporation because the contract which both parties agreed included that the Arbitration Singapore is selected as the settlement of disputes.

However, pursuant to Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Alternative Dispute Resolution for Judges expressed reject the decision of the Arbitration if declared unlawful. Based on the jurisprudence Number. 03/Arb.Btl/2005, provides another interpretation that judge may refuse arbitration ruling. This study also provides an explanation that an unlawful act has occurred and adverse PT Polyprima Karyareksa so basic losses and the demands of justice enforcement can be used as consideration by the judge in determining the verdict.

Ultimately through this thesis it is deemed necessary to have synchronization and harmonization of the substance of the Judicial Power Act especially regarding the authority of the Indonesian courts so that future settlement of international trade disputes can be resolved in an appropriate manner and qualify a win-win solution.